**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, sesuai pasal 1 ayat 5 yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang , dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan menstranfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Untuk pembangunan daerah diperlukan sumber-sumber pembiayaan *(capital investment)* berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang di terima oleh daerah dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah berperan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Secara administratife Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintahan Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintahan Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatandan Desa/Kelurahan. Masing-masing sumber keuangan atau pendapatan daerah yang terdapat dalam Laporan Realisasi APBD berasal dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sebagai besar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan bagi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikasi keberhasilan pembangunan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

Pergerakan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 disajikan pada gambar 1.1

Sumber :[www.sumsel.bps.go.id](http://www.sumsel.bps.go.id), 2017

**Gambar 1.1**

**Grafik PDRB Provinsi Sumatera Selatan**

Dilihat dari grafik diatas dapat di ketahui bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2011 Pendapatan Domestik Regional Bruto sebesar Rp.206.360.699, pada tahun 2012 Pendapatan Domesik Regional Bruto meningkat sebesar Rp.14.098.499 atau sekitar 6,83%, sedangkan pada tahun 2013 Pendapatan Domestik Regional Bruto tetap meningkat yaitu sebesar Rp.11.715.850 atau sekitar 5,31% dan kemudian pada tahun 2014 peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto meningkat menjadi sebesar Rp.10.918.720 atau 4,49%. Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

 Pada saat ini, tren perekonomian Provinsi Sumatera Selatan bergerak positif, meski faktanya ekonomi rakyat dan beberapa sektor PDRB justru masih belum stabil. Penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang utama bukan dari sektor penopang PDRB, seperti pertanian, industri pengolahan, atau pertambangan. Melainkan oleh sektor sekunder, seperti penyedia akomodasi dan makanan dan minuman, pengadaan listrik dan gas, pembangunan infrastruktur serta administrasi pemerintah. *(Sumber:* [*http://www.sumeks.co.id*](http://www.sumeks.co.id)*)*

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonmi, memberikan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian Sitorus (2015) adalah Pajak Daerah, Retribusi Raerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.Hasil dari penelitian isa (2010) adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang tidak signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian Juwari dkk (2016) adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pajak dan Retribusi serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian Fadilah (2014) adalah Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian Amelia (2008) adalah pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai pertumbuhan ekonomi yang mengalami perubahan dan hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk menguji secara empiris pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul**“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.”**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
	1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi pembahasan pada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus untuk periode 2011 sampai dengan 2014.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**14.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Darah dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Mamfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan pertumbuhan ekonomi
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan kepada pihak yang berwenang di dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di era otonomi.